

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Kanter, E.Y. *HUKUM PIDANA MILITER INDONESIA*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Moch, Faisal Salam. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.

Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas HUKUM PIDANA di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2003.

Sianturi, S.R. *HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, 2010.

### JURNAL :

Agustinus P.H., and Yuliana Yuli Wahyuningsih. "Pembaharuan Hukum Pidana Militer dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Yuridis* (2017): 203.

Amu, Robi. "Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi." *Jurnal Legalitas* (2012).

Anwar, umar. "Tindak Pidana Penggandaan Uang Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Tinjauan Kasus Penggandaan Uang Dimas Kanjeng Taat Pribadi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* (n.d.).

Astuti, Pudji. "Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Militer Bagi Prajurit TNI-AU Yang Terlibat Tindak Pidana." *Jurnal Novum* (2019).

Bassang, Tommy J. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming." *Lex Crimen* (2015).

C.Sihotang, Jimmy. "Peniadaan, Pengurangan dan Pemberatan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Militer." *Lex Crimen* (2016).

Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sitem peradilan militer di indonesia (studi tentang struktur peradilan militer)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* (2017):

107-109.

Kevin, Kembuan Bryan. "Tindak Pidana Perusakan Barang Dalam Pasal 406 Ayat(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 619 K/PID/2017)." *LEX CRIMEN* (2019).

Kusumawardani, Adelina Fitria. "Tindak Pidana Oleh Oknum Tukang Gigi Penyedia Jasa Layanan Perawatan Gigi Di Surakarta." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* (n.d.).

Rodaya, Hendra Brian. "Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHPM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997." *LEX ADMINISTRATUM* (2016).

### **Perundang-Undang:**

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA